

LKIP
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Anugerah dan bimbingan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2020 dapat disusun dengan baik, yang walaupun masih banyak kekurangan ataupun hambatan yang kami alami dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami sangat mengharapkan masukan ataupun saran yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2020 merupakan suatu pertanggungjawaban formal sebagai pengguna anggaran Organisasi Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bupati Manggarai Barat atas capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Secara umum sasaran yang direncanakan Tahun 2020 dapat terealisasi dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban kami, atas segala dukungan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak kami menyampaikan limpah terima kasih, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Labuan Bajo, 04 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Manggarai Barat



Sebastiaus Spro, SE
Pembina TK ,I / IVB
NIP.19660501 199703 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (evaluasi) kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan TUPOKSI, RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai kinerja yang harus dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas Dinas selama kurun waktu 1 (satu) tahun mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang meliputi: personil, pembiayaan dan peralatan. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi:

1. Prosentase penduduk yang memiliki KTP di Kabupaten Manggarai Barat;
2. Ketersediaan Data Base kependudukan;
3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga;
4. Persentase Pasangan Berakta Nikah;
5. Persentase Anak Berakta Kelahiran;
6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian;
7. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
8. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Penduduk berdasarkan perjanjian Kerja Sama

Dari 8 (Delapan) sasaran tersebut, dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 12 (dua belas) kegiatan, serta 2 (dua) program rutin administrasi perkantoran dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi 15 (lima belas) kegiatan di dalamnya. Secara keseluruhan dari hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2020 menunjukkan capaian kinerja yang baik. Hal ini tercermin pada 8 (Delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berkategori Baik.

Secara garis besar, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Internal:

1. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
3. Terbatasnya kemampuan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2020 baik untuk kegiatan penerbitan Kartu Identitas Anak dan pengadaan kendaraan mobilitas pelayanan serta untuk rehabilitasi/perawatan sarana prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada;

B. Eksternal

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan akan pentingnya KTP dan akta baik Ata Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Cerai dan Akte Kematian;

Adapun upaya penanganan masalah meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan pelayanan masyarakat dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan yang ada, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis;
2. Memaksimalkan anggaran yang ada (APBD Kabupaten Manggarai Barat) dan mengusulkan anggaran kepada APBD Propinsi dan APBN, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan arahan RENSTRA dan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Data Umum Organisasi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Sistematika Penyajian	5
Bab II PERENCANAAN KINERJA	6
I. Rencana Strategis 1016-2021	6
A. Pernyataa Visi	5
B. Pernyataan Misi	7
C. Tujuan Strategis	7
II. Sasaran dan Program Tahun 2016 – 2021	8
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	11
I. Capaian Kinerja	11
A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran	12
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	12
II. Akuntabilitas Keuangan	19
Bab IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menjabarkan berbagai program dan kegiatan pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dan Pengembangan Apartur Negara yang diarahkan pada makin terwujudnya daya tanggap terhadap Aspirasi Rakyat dan Dinamika Perubahan Lingkungan masyarakat, yang mendukung segala jenis Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan Fungsi Penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang makin handal, professional dan strategis.

Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Fungsi dan Tugas Pokok yang telah ditetapkan secara periodik dalam suatu Organisasi Pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat Daerah Otonom mempunyai kewajiban menyampaikan laporan sesuai sistem pelaporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP). Tujuan pembuatan LAKIP adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang merupakan salah satu persyaratan untuk terciptanya Kepemerintahan yang baik dan terpercaya dalam merespon perubahan Lingkungan Strategis di setiap Instansi Pemerintah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah seperti yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Organisasi Pelayanan publik kepada masyarakat yang transparan dan dipercaya.

B. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat menyatakan bahwa :

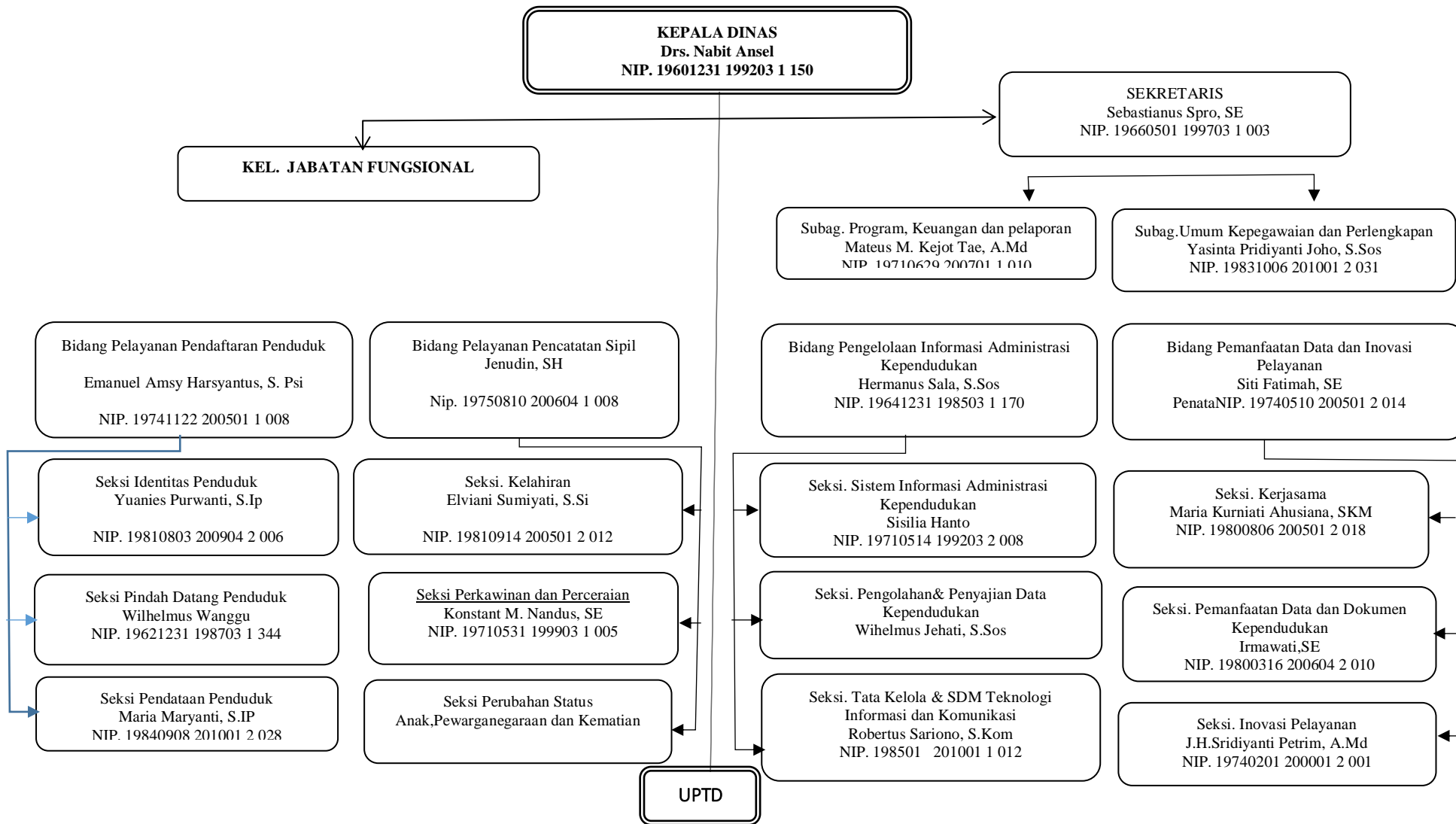
1. " Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pasal 4);
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi (Pasal 5);
 - a. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian sekretariat;
 - b. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan konsultasi pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - d. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Mutasi dan Perubahan Kewarganegaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Jaringan Komunikasi Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Perekaman Data Hasil Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemutakhiran Data Penduduk;
 - g. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - h. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pengembangan Kualitas Penduduk dan Perlindungan Penduduk;
 - i. Pelaksanaan tugas Dinas lainnya yang diberikan Pimpinan/atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab secara teknis substansi kepada Bupati Manggarai Barat dan secara administratif di bawah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat memiliki 20 orang Pejabat Struktural yang seluruhnya merupakan Pegawai yang bekerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi berikut ini

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020



D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, serta Struktur Organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 meliputi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 - 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat diperlukan perumusan suatu Perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek (taktis). Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) harus jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan harus terukur capaian kinerjanya. Yang penting juga untuk diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan **visi/misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut setiap tahun telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

I. RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan Visi, Misi dan Strategi yang jelas dan tepat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang **Visi, Misi dan Faktor-faktor kunci keberhasilan.**

A. Pernyataan Visi

Pernyataan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat adalah "Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dengan memberikan kepastian hukum untuk memperoleh rasa aman bagi masyarakat Manggarai Barat".

B. Pernyataan Misi

Pernyataan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan administrasi pencatatan sipil
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi perkembangan kependudukan
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi sistem informasi administrasi kependudukan.

C. Tujuan Strategis

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukur sejauh mana visi/misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi/misi organisasi.

Mengacu pada faktor kunci keberhasilan tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Meningkatnya Pelayanan Birokrasi disamping itu adapun tujuan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Organisasi Pelayanan Publik sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pelayanan akta catatan sipil.
- Menyelenggarakan pelayanan KTP elektronik, kartu keluarga, maupun surat keterangan pindah warga Negara Indonesia (SKPWNI).
- Menyelenggarakan pelayanan dokumen kependudukan lainnya.
- Menyelenggarakan kualitas sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
- Meningkatkan tertib administrasi keuangan, SDM dan Perkantoran.

II. Sasaran dan Program Tahun 2016 - 2021

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya Organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, tujuan tersebut dijabarkan menjadi sasaran, yaitu : Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan, dengan indikatornya dan target Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase penduduk ber KTP Elektronik, target 90,00%
2. Ketersediaan data base kependudukan, target Ada
3. Persentase Kepemilikan kartu Keluarga, target 100 %
4. Presentase pasangan berakta nikah, target 80 .00%
5. Presentase anak berakta kelahiran yang, target 85.00 %
6. Persentase kepemilikan akte Kematian, target 85,00%
7. Persentase kepemilikan kartu Identitas Anak, target 85.00%
8. Persentase Pemanfaatan data sesuai kebutuhan perangkat daerah,61.00 %

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Capain Kinerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 - 20201 .

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	SASARAN		TARGET KINERJA
NO	PROGRAM/KEGIATAN		
1	2		4
1	Pendataan Identitas Kependudukan Berbiaya Murah	Persentase Penduduk Ber KTP	90.00 % 176.655 orang
2		Ketersediaan Data Base kependudukan	Ada
3		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100 % 132.976 orang
4		Persentase Pasangan Berakta Nikah	80.00% 110.780 orang
5		Persentase Anak Berakta Kelahiran	85 .00 % 132.948 orang
6		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	40.00 % 766 Orang
7		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	85 .00 % 79.662 Orang

	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyediaan jasa surat menyurat	8.679.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	42.000.000
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	45.000.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	71.800.000
5	Peningkatan penyediaan jasa kebersihan kantor	13.981.140
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	38.172.250
7	Penyediaan alat tulis kantor	44.934.480
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.999.730
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	10.650.000
11	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	14.340.000
12	Penyediaan jasa tenaga honorer	514.900.000
13	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	244.400.000
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	142.500.000
15	Pemutahiran data penduduk	85.300.000
16	Pelayanan Kartu Identitas Anak	20.050.000
17	Inovasi Pelayanan Publik	139.907.220
18	Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan	89.000.000
19	Validasi dan Verifikasi data Kepemilikan Akta di Kecamatan	25.050.000
20	Koordinasi , Konsultasi dan Monitoring perjanjian kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Dokumen Kependudukan	9.498.510
21	Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	48.488.200
22	Pelayanan Adminuk	545.000.000
23	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi ANak	406.735.850
24	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan/Atau Pendayagunaan data Kependudukan	126.715.000
25	Koordinas dan Konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	135.830.000
	Jumlah	2,785,426,990

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang mencakup Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja dengan menggunakan Formulir/ Dokumen Rencana Kinerja Tahunan yang dilanjutkan dengan Formulir/ Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2020 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan Tahun 2020. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran Tahun 2020.

I. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran kinerja dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- ❖ 90 – 100 = Sangat Berhasil
- ❖ 80 – 89 = Berhasil
- ❖ 50 – 79 = Cukup Berhasil
- ❖ < 49 = Kurang

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Prosentase penduduk yang memiliki KTP	%	90,00	93.27	103.63
2	Ketersediaan Data Base kependudukan		Ada	Ada	100.00
3	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100,00	100.17	100.166
4	Persentase Pasangan Berakta Nikah	%	80.00	52.03	65.032
5	Persentase Anak Berakta Kelahiran	%	85.00	92.44	108.29
6	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	40.00	100	100
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	85,00	7.0	8.25

B. CAPAIAN ANALISIS KINERJA

1. Prosentase Penduduk yang memiliki KTP

Persentase penduduk yang memiliki KTP	%	90,00	93.27	103.63
---------------------------------------	---	-------	-------	--------

Berikut Tabel perbandingan realisasi Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		REALISASI CAPAIAN
1	Perekaman KTP-el	Persentase penduduk yang memiliki KTP	Jumlah Penduduk Berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	$\frac{164.765}{176.655} \times 100\% = 93.27$	$93.27/90\% \times 100 = 103.63$
			Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas		

Realisasi persentase penduduk yang memiliki KTP el di tahun 2020 sebesar 93.27 % dengan rincian Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el 164.765 orang dan Jumlah penduduk wajib KTP-el sejumlah 176.655 orang dengan capaian realisasi kinerja persentase penduduk yang memiliki

KTP-el sebesar 103.63 % jadi indikator capaian dari Penduduk yang memiliki KTP el melebihi dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 90.00% dan hasilnya sangat memuaskan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekarang semakin menyadari akan pentingnya Kartu Identitas Penduduk (KTP) sebagai salah satu persyaratan dalam berbagai urusan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahun 2019 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 107.12 % jika di bandingkan dengan tahun 2020 capaian realisasinya 103.63 % kelihatan menurun , namun realisasi capaian antara tahun 2019 dan 2020 mencapai target .

Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran corona Virus Disease 2019 (covid 19) sebagai bencana nasional. Bahkan sejak tanggal 17 maret tahun 2020 Kemenpan RB telah mengeluarkan kebijakan kepada Aparatur Sipil Negara untuk bekerja dari rumah atau work from home, pemberlakuan kebijakan ini terus diperpanjang sesuai dengan kondisi covid 19 yang belum kunjung berakhir. Seiring pandemi yang telah memondial akan berdampak terhadap totalitas kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga adanya penurunan capain kinerja pada indikator ini sebesar 3.49 % pada tahun 2020.



Antusias masyarakat untuk mendapatkan KTP el dalam pelayanan ke Desa/kelurahan

2. Ketersediaan Data Base Kependudukan

Ketersediaan Data Base kependudukan Ada	Ada	100.00
--	-----	--------

Target capaian kinerja pada indikator kedua adalah ada database kependudukan dengan realisasi Tahun 2020 “ada database” sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100%. Dengan capaian kinerja sebesar 100% maka indikator kedua capaiannya mencapai target dan bernilai Sangat berhasil.

Dalam menunjang Pencapaian Keberhasilan indikator ini didukung oleh berbagai aspek diantaranya :

1. Peningkatan Infranstruktur (Sarana dan prasarana)
2. Pelatihan pengelola database kependudukan
3. Peningkatan pelatihan tenaga pengelola sistem Informasi Administrasi kependudukan
4. Peningkatan pengembangan aplikasi Sistem informasi administrasi Kependudukan

3. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga

Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100.00	100.17	100.16
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Berikut Tabel perbandingan realisasi Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		REALISASI CAPAIAN
1	Pelayanan Kartu Keluarga	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	Jumlah Kartu keluarga	$\frac{66.543}{66.433} \times 100 \% = 100.166$	$100.166/100 * 100 = 100.166$
			Jumlah Kepala Keluarga		

Target capaian kinerja pada indikator Ketiga ini sebesar 100.% dengan realisasi capaian sebesar 100.17 sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 100.166 %. Dengan capaian kinerja sebesar 100.166 % maka target kinerja indikator ketiga ini melibihi target yang telah ditetapkan sebesar 100 % dan capaiannya bernilai sangat berhasil .

Pada tahun 2019 dengan realisasi capaian kinerjanya sebesar 85.42 % bila dibandingkan dengan Tahun 2020 realisasi capaiannya sebesar 100.166%, Untuk mencapai realisasi capaian 100.166 % pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki cara dan metode tersendiri yang gunakan pada setiap inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Inovasi Pelayanan keliling samapai sore hari
2. Inovasi Pelayanan administrasi tanpat waktu



4. Persentase Pasangan berakta Nikah

Persentase Pasangan Berakta Nikah	%	80.00	52.03	65.032
-----------------------------------	---	-------	-------	--------

Berikut Tabel perbandingan realisasi Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		REALISASI CAPAIAN
1	Pelayanan Akta Nikah	Persentase Kepemilikan Akta Nikah	Jumlah Penduduk berstatus Kawin	$\frac{57.643}{110.780} \times 100 \% = 52.03$	$\frac{52.03}{80} * 100 = 65.042$
			Jumlah pasangan berkata Nikah		

Realisasi Persentase Pasangan Berakta Nikah pada tahun 2020 sebesar 52.03 % dengan rincian jumlah pasangan yang berakta Nikah sebesar 57.634 orang dan Jumlah penduduk yang

berstatus kawin 110.780 orang maka capaian realisasi kinerja persentase pasangan berakta nikah adalah 65.042 % . Dengan capaian realisasi kinerja sebesar 65.042 % maka capaian indikator ini bernilai cukup berhasil.

Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran corona Virus Disease 2019 (covid 19) sebagai bencana nasional. Bahkan sejak tanggal 17 maret tahun 2020 Kemenpan RB telah mengeluarkan kebijakan kepada Aparatur Sipil Negara untuk bekerja dari rumah atau work from home, pemberlakuan kebijakan ini terus diperpanjang sesuai dengan kondisi covid 19 yang belum kunjung berakhir. Seiring pandemi yang telah memondial akan berdampak terhadap totalitas kinerja Aparatur Sipil Negara sehingga adanya penurunan Realisasi capain pada indikator ini sebesar 13.29 % pada tahun 2020.

Pada tahun 2019 dengan realisasi capaian kinerjanya sebesar 47.25 % bila dibandingkan dengan Tahun 2020 realisasi capaian sebesar 65.042 % , Untuk mencapai realisasi capaian 65.042 % pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki cara dan metode tersendiri yang gunakan pada setiap inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Inovasi Pelayanan akta nikah terintegrasi
2. Inovasi Pelayanan administrasi tanpat waktu
3. Inovasi Pelayanan keliling samapai sore hari



5. Persentase Anak Berakta Kelahiran

Persentase Anak Berakta Kelahiran	%	85.85	92.44	108.75
-----------------------------------	---	-------	-------	--------

Berikut Tabel perbandingan realisasi Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		REALISASI CAPAIAN
1	Pelayanan Akta Kelahir	Persentase Anak berakta kelahiran	Jumlah Anak berakta kelahiran	$\frac{90.096}{97.465} \times 100 \% = 92.44\%$	$92.44/85.85 * 100 = 108.75$
			Jumlah Anak yang memiliki Akta lahir		

Realisasi persentase anak berakta kelahiran pada tahun 2020 sebesar 92.44 % dengan rincian jumlah anak berakta kelahiran 122.369 orang dan jumlah wajib akta sebesar 132.948 orang maka capaian realisasi kinerja Persentase Anak Berakta Kelahiran 108,75% , Dengan capaian kinerja sebesar 108.75% maka target kinerjanya melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 85.85% dan bernilai Sangat berhasil.

Pada tahun 2019 dengan realisasi capaian kinerjanya sebesar 103,07% bila dibandingkan dengan Tahun 2020 ini realisasi capaian kinerja 108,75%, hal ini terjadi karena masyarakat semakin menyadari akan pentingnya akta kelahiran sebagai data untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk.

Untuk mencapai realisasi capaian 108.75 % pada tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki cara dan metode tersendiri yang digunakan pada setiap inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Inovasi pelayanan Jemput Bola
2. Inovasi Pelayanan akta nikah terintegrasi

3. Inovasi Pelayanan administrasi tanpat waktu
4. Pelayanan Online
5. Inovasi Pelayanan keliling samapai sore hari



6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian

Persentase Kepemilikan Akta Kematian	%	40	100	100
--------------------------------------	---	----	-----	-----

Berikut Tabel perbandingan realisasi Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		REALISASI CAPAIAN
1	Pelayanan Akta kematian	Persentase Anak berakta kelahiran	Jumlah Akta Kematian yang di terbitkan	$\frac{755}{755} \times 100 \% = 100 \%$	$100 / 40 * 100 = 250$
			Jumlah Peristiwa Kematian yang di lapor		

Realisasi Persentase Kepemilikan Akta Kematian di tahun 2020 sebesar 100 % dengan rincian jumlah akta kematian yang di terbitkan 755 Orang dan Jumlah Akta kematian yang di laporkan sebesar 755 orang . maka capaian realisasi kinerja Persentase Kepemilikan Akta Kematian sebesar 250 % Melebihi dari target kinerja yang di tetapkan sebesar 40 % dengan bernilai sangat berhasil . Pada tahun 2019 dengan realisasi capaian kinerjanya sebesar 78,94% bila dibandingkan dengan Tahun 2020 ini terdapat perubahan yang sangat tinggi, sehingga capaian target antara tahun 2019 dan Tahun 2020 ada peningkatan, hal ini terjadi karena masyarakat semakin menyadari akan pentingnya akta kematian sebagai penunjang program adminitrasi kependudukan.



7. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	85,00	7.0	10.588
---	---	-------	-----	--------

Berikut Tabel perbandingan realisasi Kinerja tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	REALISASI CAPAIAN
1	Pelayanan KIA	Persentase kepemilikan Identitas Anak (KIA)	Jumlah Anak usia -17 tahun kurang 1 (satu) Hari yang sudah memiliki Kia <u>Jumlah Anak usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA</u>	$\frac{82.002}{7.802} \times 100 \% = 9.51 \%$ $9.51 / 85 * 100 = 10.588$

Target capaian kinerja pada indikator ini sebesar 85,00% dengan realisasi capaian sebesar 9.51 % sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 10.588 %. Dengan capaian kinerja sebesar 10.588 maka indikator capaiannya tidak mencapai target dengan bernilai kurang berhasil. Adapun penyebab rendahnya realisasi persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Penyebaran corona Virus Disease 2019 (covid 19) yang tidak kunjung berakhir sehingga pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak maksimal



Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran "meningkatnya kualitas administrasi kependudukan" adalah sebesar 99.70 % atau dikategorikan **sangat Berhasil**.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah :

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
2. Sumber daya manusia (SDM) :
Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan menyadari pentingnya dokumen kependudukan dan sebagian masyarakat masih ada yang berpendapat bahwa kepemilikan dokumen kependudukan khususnya akta kematian “Tidak penting”
4. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum maksimal pada tahun 2020
5. Pelayanan KTP elektronik belum maksimal karena banyak penduduk wajib KTP yang belum perekaman KTP elektronik dan banyak yang sudah perekaman KTP elektronik yang belum mendapat fisik KTP elektronik serta banyak peralatan KTP elektronik yang kondisinya rusak.
6. Penyebaran corona Virus Disease 2019 (covid 19) yang tidak kunjung berakhir sehingga pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) tidak maksimal .

Pemecahan Masalah

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antar Dinas/Instansi terkait termasuk Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Desa tentang pentingnya administrasi/ dokumen kependudukan.
4. Melaksanakan Sosialisasi ke sekolah-sekolah Mulai dari TK dan SD Sekabupaten Manggarai Barat tentang pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Meningkatkan pelayanan KTP Elektronik dengan berbagai inovasi pelayanan

II. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan/Aspek Keuangan

Jumlah Alokasi dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun Anggaran 2020 yang bersumber pada Dana APBD sebesar Rp 4,738,191,006 yang terdiri dari:

A. Belanja tidak langsung : Rp. 1,952,784,016

B. Belanja langsung : Rp. 2,785,406,990

Adapun perincian dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	8.679,00 12 bulan 100%	1.261.000 12 bulan 100%	100%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.000.000 12 bulan 100%	42.000.000 12 bulan 100%	100%
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	45.000.000 1 unit roda 4 10 unit roda 2 100%	45.000.000 1 unit roda 4, 10 unit roda 2 100%	96,41%
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	71.800.000 12 bulan 100%	71.800.000 12 bulan 100%	100%
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.981140 12 bulan 100%	13.981140 12 bulan 100%	100%

6.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	38.172.250 12 bulan 100%	38.172.250 12 bulan 100%	100%
7.	Penyediaan alat tulis kantor	44.894.330 12 bulan 100%	44.894.330 12 bulan 100%	100%
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.999.730 3 paket 100%	11.999.730 3 paket 100%	100%
9.	Penyediaan makanan dan minuman	10.650.000 12 bulan 100%	10.650.000 12 bulan 100%	100 %
10.	Fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	14.340.000 12 Bulan 100%	99.120.400 12 Bulan 100%	99,76%
11.	Penyedia jasa honor daerah	514.900.000 12 Bulan 100%	514.900.000 12 Bulan 100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan yang baik dalam prosentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran. Dimana semua realisasi rata-rata sesuai target, hampir semua capaian indikator sasaran mencapai 100 % dan harus diakui bahwa fakta lapangan menunjukkan meningkatnya sumber daya Manusia dalam pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengadaan Alat Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)	244.400.000 2 unit 100%	216.062.000 2 unit 100%	88,41%

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan yang baik dalam prosentase kualitas peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Dimana realisasinya sesuai target.

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pemutahiran Data Penduduk	85.300.000 1 paket 100%	85.300.000 1 paket 100%	100 %
2	Pelayanan Kartu Identitas Anak	20.849.810 1 paket 100%	20.849.810 1 paket 100%	100%
3	Inovasi Pelayanan Publik	139.907.220 1. paket 100%	139.907.220 1 paket 100%	100%
4	Pelayanan penerbitan akta perkawinan	89.000.000 1 paket 100%	88.999.300 1 paket 100%	100%
5	Validasi dan verifikasi data kepemilikan akta di kecamatan	25.050.000 1 paket 100%	25.024.600 1 paket 100%	99,90%
6	Koodinasi ,konsultasi dan Monitoring perjanjian kerja sama PKS pemanfaatan Data dokumen kependudukan	9.548.510 1 paket 100%	9.948.510 1 paket 100%	99,48%
7	Pelaksanaan Kebijakan dan penyelenggaraan Administrasi kependudukan	140.600.000 1 paket 100%	119.075.599 1 paket 100%	84.69%
8	Pelayanan Adminduk	545.000.000 1 paket 100%	545.000.000 1 paket 100%	100%
9	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas resmi Anak	406.776.000 1 paket 100%	406.930.475 paket 100%	99,79%

10	Pengelola sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan/atau pendayagunaan data kependudukan	126.629.000 1 paket 100%	126.629.000 1 paket 100%	99.92 %
11	Koodinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	135.830.000 1 paket 100%	135.807.100 1 paket 100%	99,98%

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan yang baik dalam prosentase kualitas penataan administrasi kependudukan. Dimana semua realisasi rata-rata sesuai target. Hampir semua capaian indikator sasaran tersebut mencapai 100% dan harus diakui bahwa fakta lapangan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan administrasi kependudukan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 merupakan salah satu bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Secara umum dapat disimpulkan bahwa keseluruhan sasaran strategis dan capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sudah sesuai dengan yang diharapkan bahkan ada yang melampaui target.

Sumber pendanaan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bila di bandingkan dengan tahun anggaran 2019 ada peningkatan, baik segi jumlah anggaran maupun dari segi realisasi anggaran yakni 99.70% untuk merealisasikan program dan kegiatan yang bersumber dana APBD Tahun 2020.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk kegiatan dan kinerja berikutnya.

Labuan Bajo, 04 Januari 2021

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Manggarai Barat



Sebastiaus Spro, SE
Pembina TK ,I / IVB
NIP.19660501 199703 1 003